Kompak! Pemkot, BBWS, dan Akademisi Bersatu Susun Desain Besar Penanganan Banjir

BANDAR LAMPUNG – Aula IIB Darmajaya menjadi saksi lahirnya semangat gotong royong dalam menangani persoalan klasik ibu kota. Melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Selasa (28/4/2026), Pemerintah Kota Bandar Lampung, para pakar dari Unila dan Itera, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung duduk satu meja merumuskan roadmap penanganan banjir yang komprehensif.

Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menekankan bahwa penanganan banjir memerlukan pendekatan yang bijak dan humanis. Ia menyoroti banyaknya bangunan di sempadan sungai yang menghambat aliran air, namun tetap mengutamakan perlindungan hak hunian warga.
“Kita perlu duduk bersama mencari solusi paling bijak. Sisi sosial masyarakat tetap kita perhatikan, namun aliran sungai harus tetap terjaga. Ini adalah tantangan yang harus kita selesaikan secara kolektif,” tutur Bunda Eva dengan penuh keterbukaan.

Kepala BBWS Mesuji Sekampung, Elroy Kawari, memaparkan data krusial terkait pola banjir yang terus berubah. Ia mengidentifikasi delapan faktor utama penyebab banjir di Bandar Lampung, di antaranya:

* Curah hujan ekstrem dan tanggul jebol.
* Penyempitan sungai serta efek bottleneck pada jembatan dan gorong-gorong.
* Sedimentasi tinggi, tumpukan sampah, hingga padatnya pemukiman di bantaran sungai.

“Penanganan tidak bisa parsial, harus dari hulu ke hilir dengan masterplan terpadu. Kami prioritaskan pada titik-titik kritis mengingat keterbatasan anggaran,” jelas Elroy.

Dukungan penuh datang dari kalangan akademisi. Dekan Fakultas Teknik Unila, Dr. Ahmad Herison, mengingatkan bahwa teknologi sehebat apa pun tidak akan maksimal tanpa perubahan budaya masyarakat dalam mengelola sampah.

Sementara itu, pakar dari Itera, Dr. Eng. IB Ilham Malik, menyarankan penguatan tata ruang berbasis data presisi serta penerapan drainase vertikal dan sumur resapan di setiap rumah warga sebagai langkah konservasi air.

FGD ini berhasil menelurkan lima poin kesepakatan yang menitikberatkan pada tanggung jawab kolektif. Banjir bukan lagi beban satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, DPRD, akademisi, dan masyarakat.

Langkah strategis ini menjadi awal baru bagi Bandar Lampung untuk bertransformasi menjadi kota yang lebih tangguh dan nyaman. Dengan kolaborasi harmonis antara kebijakan pemerintah dan partisipasi aktif warga menjaga sungai, Bandar Lampung bebas banjir kini bukan sekadar impian.(Nda)